

ICCTF NEWS

Supporting The Indonesian Government for a Better Climate



Gambar 1.

Bappenas, ICCTF, Pemerintah Pusat bersama Stakeholder setempat dan juga para mitra pelaksana COREMAP-CTI World Bank Nusa Tenggara Barat pada kegiatan Rapat Koordinasi Penyusunan Exit Strategy COREMAP-CTI WB di TNP Laut Sawu, NTT.

Hasil COREMAP-CTI World Bank Exit Strategi:

Diperlukan Komitmen Semua Pihak Dalam Menjamin Keberlanjutan Program di NTT

Kupang, Indonesia - *Climate Change Trust Fund (ICCTF)* menyelenggarakan kegiatan Penyusunan *Exit Strategy Program Coral Reef Rehabilitation and Management Program - Coral Triangle Initiative (COREMAP-CTI) World Bank (WB)*, 11 Desember 2021, di Taman Nasional Perairan Laut Sawu Nusa Tenggara Timur (NTT), untuk menjamin keberlanjutan Program yang berakhir pada akhir Maret 2022 ini.

COREMAP-CTI WB merupakan salah satu upaya nyata dari Pemerintah Indonesia dalam menjaga keberlanjutan kelestarian ekosistem pesisir utama, terutama sekali terumbu karang, dan keanekaragaman hayati di dalamnya. Program ini juga mengedepankan penguatan kapasitas masyarakat setempat karena merekalah yang menjadi

garda terdepan dalam melindungi kawasan ekosistem pesisir utama ini, dengan memberikan penguatan kapasitas kepada masyarakat setempat.

Kegiatan COREMAP-CTI WB ini di implementasikan di dua provinsi yaitu NTT dan Papua Barat. Saat ini di NTT pelaksanaan COREMAP-CTI WB dilaksanakan melalui kerja sama ICCTF dengan 4 mitra pelaksana yaitu Yayasan Terumbu Karang Indonesia (TERANGI), Yayasan Perkumpulan Pemberdayaan Masyarakat dan Pendidikan Konservasi Alam (YAPEKA), Yayasan Pusat Informasi Lingkungan Indonesia (PILI) dan Yayasan Reef Check Indonesia (YRCI). Terdapat 10 Kabupaten yang termasuk ke dalam kawasan Taman Nasional Perairan Laut Sawu dan 6 kabupaten mendapatkan intervensi dari kegiatan COREMAP-CTI WB.



Gambar 2.

Mitra pelaksana COREMAP-CTI World Bank menyampaikan pemaparan program yang telah dilaksanakan pada kegiatan Rapat Koordinasi Penyusunan Exit Strategy COREMAP-CTI WB di TNP Laut Sawu, NTT.

Di Tahun 2021 adalah tahun kedua pelaksanaan program kegiatan dari COREMAP-CTI WB. Perkembangan capaiannya sudah mulai terlihat antara lain yaitu: (i) pembangunan infrastruktur penunjang Ekowisata, (ii) instalasi PLTS untuk mendukung kegiatan perikanan masyarakat, (iii) kajian investasi bisnis ekowisata, (iv) pembangunan infrastruktur untuk mendukung pengawasan berbasis masyarakat, (v) kajian mitigasi *bycatch* hiu, (vi) kajian populasi dan pergerakan *Cetacean*, (vii) peningkatan kapasitas staff daerah dan masyarakat, (viii) pengembangan ekowisata berbasis *species*, serta (ix) dukungan akses pengelolaan sumber daya pesisir kepada kelompok masyarakat hukum adat.



Gambar 3.

Direktur Kelautan dan Perikanan Kementerian PPN/ Bappenas (Sri Yanti JS-Kanan) dan Eksekutif Direktur ICCTF (Tonny Wagey-tengah) bersama dengan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT (George Melkianus Hadjoh-Kiri) dalam Press Conference kegiatan Rangkaian Exit Strategy dan Kunjungan Lapangan COREMAP-CTI World Bank kepada rekan Media di Kupang, NTT.

Dari kegiatan Exit Strategi para mitra dan pemangku kebijakan nasional dan daerah bisa melihat banyaknya pembelajaran terutama dalam kerja kolaborasi mereka. Melihat ketimpangan, tantangan selama ini, sekaligus saling berbagi solusi dari masing-masing pengalaman yang telah mereka jalani sepanjang menerapkan program ini. Masalah koordinasi, menginformasikan perkembangan terkini adalah salah satu beberapa hal yang dicatat sebagai kunci suksesnya program ini di lapangan. Dari hasil pembahasan tersebut memudahkan masing-masing mitra dan pemangku kebijakan menyusun rencana kerja keberlanjutan paska COREMAP-CTI WB ini akan berakhir.

Implementasi di lapangan ini akan berakhir pada bulan Maret 2022, untuk itu perlu adanya jaminan dan perhatian terkait dengan proses transfer aset, transfer *knowledge* dan keberlanjutan kegiatan yang memerlukan pendampingan setelah project selesai dan harus melibatkan banyak pihak,” tegas Direktur Kelautan dan Perikanan Bappenas yaitu Dr. Ir. Sri Yanti JS, MPM, dalam *press conference Exit Strategy COREMAP-CTI WB* di TNP Laut Sawu, NTT 15/12/2021.

Pelaksanaan *Exit Strategy* yang telah disusun bersama ICCTF dan para mitra ini nantinya akan mendapatkan masukan dari para pemangku kepentingan, baik dari pemerintah daerah dan pusat. Bagaimana pun keberlanjutan program ini memang membutuhkan komitmen Bersama. Karena masyarakat sebagai garda terdepan tidak bisa bekerja sendiri, dibutuhkan dukungan lebih lanjut terutama dalam memelihara dan menjaga sarana dan prasarana yang ada. Serta tetap memastikan program ini terus bermanfaat dan berkelanjutan, bahkan diharapkan bisa direplikasi ke wilayah serupa lainnya

PROGRAM : COREMAP-CTI WORLD BANK

Training Bioeconomic dan *Marine Stewardship Council* (MSC) Untuk Perikanan – Udang Berkelanjutan



Gambar 4.

Bappenas, ICCTF, Pemerintah Daerah bersama Stakeholder setempat dan para peserta pada kegiatan Training Bioeconomic dan MSC Udang di Bali.

Nusa Dua, Bali, Indonesia - Kementerian PPN/ Bappenas dan *Indonesia Climate Change Trust Fund* / ICCTF menyelenggarakan, Pelatihan dan Praktek Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan sebagai Penerapan Pendekatan Bio-ekonomi pada Perikanan Udang Indonesia di Nusa Dua, Bali, pada 23-27 November 2021.

Pelatihan ini diberikan kepada pemangku kepentingan terkait untuk memberikan pengenalan standar perikanan dan udang berkelanjutan serta rantai pengawasannya secara berkelanjutan. Hal ini dilakukan sebagai upaya mengatasi permasalahan penangkapan ikan yang tidak berkelanjutan dan melindungi pasokan makanan hasil laut di masa yang akan datang. Sertifikasi MSC (*Marine Stewardship Council*) sebuah lembaga nirlaba Internasional yang bisa memastikan sebuah produk kelautan yang dihasilkan suatu negara sudah memenuhi standar keberlanjutan bagi perlindungan pasokan makanan hasil laut. Sertifikasi ini memberikan ekolabel biru yang menandakan apresiasi karena produk yang dihasilkan menggunakan praktik-praktik perikanan keberlanjutan dan mendorong konsumen memilih makanan hasil laut dari hasil praktik baik tersebut.

Karena itu penting sekali memastikan semua produk perikanan dan udang tangkapan Indonesia sudah memenuhi standar perikanan yang bersertifikasi MSC dan berhak mendapatkan ekolabel biru, sehingga produk yang dihasilkan Indonesia sudah memenuhi standar keberlanjutan dan sekaligus bisa diterima pasar Internasional.

Kegiatan pelatihan ini sendiri selaras dengan Perencanaan Pembangunan (RPJMN) 2020-2024 yang mengamanatkan pentingnya

mencapai keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan, dimana pengelolaannya haruslah berbasis pada pengetahuan, dan penataan ruang melalui Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP). Dalam *Fisheries Management Area* (FMA), terdapat kebutuhan untuk mengukur kapasitas sumber daya dan jumlah sumber daya yang dapat dikelola untuk mendapatkan keuntungan ekonomi yang memiliki manfaat secara optimal dan hal tersebut dapat dianalisis menggunakan pendekatan Bioekonomi. Selain itu, kegiatan ini diharapkan kelak bisa mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) pada *Goal 14* yang memiliki 3 indikator yaitu proporsi tangkapan ikan yang berada dalam biologis yang aman, dan terkelolanya 11 WPPNRI secara berkelanjutan.

Pelatihan ini dilakukan secara *offline* dan *online* melalui aplikasi Zoom (secara *hybrid*). Pelatihan dilakukan selama 2 hari, dengan memadukan sesi kelas dan kunjungan lapangan, ke Pelabuhan Tanjung Benoa dan Industri Perikanan yang telah memiliki sertifikasi dan telah mempraktikkan cara-cara berkelanjutan. Para pemateri terdiri dari narasumber atau pelatih yang telah memiliki kualifikasi unggul di bidangnya secara nasional dan internasional yang tersusun dari 11 Topik tentang bio-ekonomi Perikanan dan Sertifikasi Produk MSC.

“kegiatan ini merupakan sebagai salah satu cara untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di sektor perikanan khususnya komoditi udang. Sehingga, hal ini dapat didorong oleh Pemerintah setelah pandemi COVID-19, dan diharapkan pertumbuhan ekonomi bisa meningkat dari sektor Kelautan dan Perikanan,” jelas Kepala Pusbindiklatren Kementerian PPN/Bappenas yaitu Dr. Guspika MBA, yang juga ikut hadir dalam pelatihan tersebut.



Gambar 5.

Para peserta pelatihan melakukan kunjungan Lapangan ke kantor Pemerintahan pada kegiatan Training Bioeconomic dan MSC Udang di Bali.

Direktur Kelautan dan Perikanan Kementerian PPN/ Bappenas, Dr. Sri Yanti JS, MPM, pada Pidato Pembukaan di pelatihan tersebut menyatakan, pembangunan perikanan harus didukung dengan data dan informasi yang akurat, kajian yang memadai, sarana prasarana pendukung dan SDM yang memadai. Sehingga memperhatikan keseimbangan antara ekonomi sekaligus ekologi.

“Usaha perikanan tangkap dimulai dari sistem rantai yang terdiri dari produksi, *storage*, proses, *distribution* dan *consumption*. Produksi perikanan tangkap haruslah sesuai dengan pemanfaatan SDI secara berkelanjutan. *Handling* dan *Storage* harus dengan penanganan yang baik melalui *cold chain system*. *Processing* harus dengan teknologi dalam memanfaatkan bahan baku dan sertifikasi produk. *Distribution* harus dengan menelusuri produk dan pemasaran produk yang berdaya saing. *Consumption* harus dengan peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang ikan yang dikonsumsinya,” jelasnya

Sementara itu Dr. Gellwynn Jusuf, Perencana Ahli Utama Kementerian PPN/ Bappenas, dalam paparannya menjelaskan, adanya tantangan dari *supply chain* perdagangan yaitu permintaan akan produksi yang

semakin tinggi dan disertai sumber daya yang semakin berkurang.

“Perdagangan yang semakin meningkat maka diperlukan sertifikasi, kebutuhan informasi bagi publik, pelaku usaha yang menghadapi banyak persyaratan dan konsumen menghadapi banyak tambahan pilihan. Hampir 72% udang yang ditangkap di laut merupakan udang yang tidak tersertifikasi. Berbeda dengan udang budidaya, status udang budidaya yang tidak tersertifikasi adalah 28,1%. *Eco-labelling* merupakan hal yang bermanfaat untuk meningkatkan harga jual, investasi dan pasar. Namun sertifikasi *eco-labelling* masih memiliki pekerjaan yang panjang, karena di dunia ini hanya 13% yang memperoleh sertifikasi MSC dan hanya 20 perusahaan yang tersertifikasi MSC di dunia,” tambahnya.

Direktur Eksekutif Indonesia *Climate Change Trust Fund*, Dr. Tonny Wagey selaku pelaksana kegiatan juga menjelaskan, penerapan pendekatan bio-ekonomi pada perikanan udang di Indonesia khususnya wilayah Bali untuk dapat mengelola sumberdaya alam kelautan dan perikanan adalah peran dan tanggung jawab bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, nelayan, pelaku usaha, dan Masyarakat.

“Diharapkan setelah terselenggaranya pelatihan ini, ilmu yang telah diperoleh para peserta dapat diterapkan dalam pekerjaan dan usaha untuk peningkatan kapasitas yang dapat bermanfaat bagi pengelolaan perikanan udang menuju sertifikasi MSC,” jelasnya.

Oleh karenanya, tambah Tonny lagi, tata kelola wilayah perikanan memerlukan kolaborasi antara pemangku kepentingan yang dimulai dari ketersediaan data, pengaturan alat tangkap dan juga peningkatan pemahaman untuk membangun kesepakatan bersama dalam pengelolaan.

Pelatihan ini diikuti oleh 53 orang dari institusi terkait baik dari pemerintah pusat dan daerah, akademisi, NGO dan asosiasi. 11 topik materi telah disampaikan oleh 10 pemateri tentang perikanan terukur, alat tangkap, bioekonomi, pembelajaran dari Australia dan juga pengenalan sertifikasi.



Gambar 6.

Perencana Ahli Utama Kementerian PPN/ Bappenas, (Gellwynn Jusuf), Direktur Kelautan dan Perikanan Kementerian PPN/ Bappenas (Sri Yanti JS), dan Eksekutif Direktur ICCTF (Tonny Wagey) bersama Kepala Pusbindiklatren Bappenas (Guspika) menyampaikan pembukaan training serta arahan pelaksanaan Training Bioeconomic dan MSC Udang di Bali.

PROGRAM : COREMAP-CTI ASIAN DEVELOPMENT BANK

FGD COREMAP-CTI ADB Untuk Memperkuat Pariwisata Berkelanjutan Berbasis Konservasi Alam dan Budaya.



Gambar 7.

Bappenas, ICCTF, Pemerintah Pusat bersama Stakeholder setempat dan juga para peserta FGD Identifikasi Tujuan dan Kegiatan Ekowisata di Gili Balu, Lombok, NTB.

Nusa Tenggara Barat (NTB) - Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF) menggelar kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dengan para mitranya agar bersama bisa menguatkan sektor pariwisata pesisir dan kelautan yang bukan hanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat tetapi juga bisa menciptakan pariwisata berkelanjutan berbasis konservasi alam dan budaya.

Kegiatan ini dilakukan di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB) pada 19 November 2021, sebagai bagian dari pelaksanaan program COREMAP-CTI ADB. Para peserta secara bersama secara konkret bisa mengidentifikasi

Karena itu FGD kemudian secara bersama mengidentifikasi, berbagi pengalaman, dan memberikan solusi serta rekomendasi terkait dengan pelaksanaan sektor pariwisata yang pesisir dan kelautan yang ada di sana. Berikut adalah hasil beberapa kesimpulan diskusi:

1. Tujuan pariwisata yang diperoleh adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kehidupan sosial dan ekonomi daerah melalui pariwisata berkelanjutan berbasis konservasi alam dan budaya.
2. Kegiatan Wisata yang direkomendasikan antara lain:
 - Sub Sea (Kapal selam ekowisata)
 - Parkir perahu
 - Edukasi *marine tourism*
 - Pembuatan paket wisata sampai ke Mantar
 - paket wisata *Adventure tourism*
 - Paket untuk *blogger* dan *backpackers*
 - Wistawan khusus yang sudah ada paket wisatanya

- Industri kreatif dan *home* industri
- *Travel patterns* (titik Potensi) dan promosi paket wisata
- Pendampingan kebijakan
- Pengelompokkan dan Pendalaman kegiatan pariwisata ini nantinya akan didetailkan pada workshop selanjutnya di tahun mendatang.

3. Kajian lebih lanjut mengenai *data trend* pariwisata, tipologi wisatawan dan eksisting kebijakan daerah.
4. Koordinasi dengan stakeholders (*pentahelix*) pariwisata harus lebih intensif terutama ke pemerintahan dari pusat sampai ke level CDK.
5. Kajian tentang ekosistem yang ada perlu ditingkatkan tidak hanya yang ada di dalam laut melainkan juga di kawasan daratannya.



Gambar 9.

Direktur Kelautan dan Perikanan Kementerian PPN/ Bappenas (Sri Yanti JS) didampingi dengan Team Leader COREMAP-CTI ADB (Leonas Chatime) bersama Stakeholder lokal menyampaikan arahan dan tujuan dalam pelaksanaan FGD Identifikasi Tujuan dan Kegiatan Ekowisata di Gili Balu, Lombok, NTB.



Gambar 10.

Para Peserta melakukan diskusi dan tanya jawab dalam kegiatan FGD Identifikasi Tujuan dan Kegiatan Ekowisata di Gili Balu, NTB.

INTERNAL ICCTF SEKRETARIAT PRODUKSI



1. Kalender ICCTF Tahun 2022



2. Laporan Tahunan 2021



3. Laporan Kinerja Satker ICCTF 2021

EXTERNAL COLABORATION EVENTS

1 Geopark Summit Indonesia ESDPM Kementerian PPN/ Bappenas

Pada bulan November 2021, *Indonesia Climate Change Trust Fund* /ICCTF melakukan publikasi komunikasi secara digital melalui event virtual, “*Geopark Indonesia Summit Exhibition 2021*,” yang diselenggarakan oleh Kementerian PPN/ Bappenas. Dalam kegiatan ini ICCTF berkontribusi melalui produksi media secara digital dalam bentuk materi publikasi, visual foto, serta video. Produksi media cetak ini berupa *factsheet* ICCTF 2021 dan *ICCTF Credentials*, selain itu juga *factsheet* materi program dari *COREMAP-CTI World Bank* dan *Asian Development Bank*. Produksi media visual berupa foto dan video kegiatan ICCTF serta program *COREMAP-CTI World Bank* yang dapat dilihat pada gambar sebagai berikut :



Geopark Indonesia (Virtual Summit 2021)



Digital Visual Documentation Program ICCTF on Geopark Indonesia Summit 2021. Bappenas Page Video COREMAP-CTI



Booth ICCTF dalam Kementerian PPN/ Bappenas di Geopark (Virtual) Exhibition 2021.



Indonesia Climate Change Trust Fund Page Digital Visual Documentation Program ICCTF on Geopark Indonesia Summit 2021.



2 How Can Blue Carbon Policies be Designed to Drive Sustainable and Effective Change for Side Event COP26 (Bappenas & ICCTF)



3 Webinar of Renewable Energy Summit 2021: Blue Carbon sebagai Bagian Proses Dekarbonisasi untuk Net Zero Emission di Indonesia (ICCTF)

PUBLIKASI

1 | Memperkuat Kawasan Konservasi Dalam Mewujudkan Wisata Bahari Berkelompok, Sri Yanti JS, Tempo (26 Desember 2021)



Ditulis oleh Sri Yanti, Direktur Kelautan dan Perikanan, Kementerian PPN/Bappenas. Selengkapnya dapat dilihat pada: <https://nasional.tempo.co/read/1543397/memperkuat-kawasan-konservasi-dalam-mewujudkan-wisata-bahari-berkelanjutan/full&view=ok>

Konsep pengembangan kawasan konservasi menjadi salah satu tujuan wisata adalah suatu upaya untuk menyeimbangkan antara pelestarian dan pemanfaatan. Tentunya dengan memperhatikan kaidah-kaidah

keberlanjutan dan juga alokasi zonasi dalam kawasan. Dengan luas kawasan konservasi perairan 28,4 juta hektar, yang terbentang dari Barat sampai Timur Indonesia tentunya potensi wisata yang dimiliki sangat besar. Melihat kondisi yang ada saat ini, tren wisata sudah berubah, dari *mass tourism* ke wisata spesifik dan minat khusus yang sebagian besar daya tarik wisatanya ada di wilayah pesisir. Namun, apakah lahan itu bisa dikembangkan jadi destinasi wisata? Tentunya harus ada banyak upaya yang dilakukan untuk menjawab pertanyaan ini dan juga diperlukan kajian untuk mengidentifikasi peluang dan tantangannya.

2 | Mengenal COREMAP-CTI, Program Strategis Pemerintah dalam Melestarikan Terumbu Karang dan Kawasan Pesisir,

Tonny Wagey, Kompas (11 Desember 2021)



Ditulis oleh Dr Tonny Wagey, Executive Director Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF).

Selengkapnya dapat dilihat pada: <https://biz.kompas.com/read/2021/12/11/100000928/mengenal-coremap-cti-program-strategis-pemerintah-dalam-melestarikan-terumbu>.

Mengenal COREMAP-CTI, program strategis pemerintah dalam melestarikan Terumbu Karang dan kawasan Pesisir. Kelestarian sumber daya laut dan pesisir menjadi perhatian serius pemerintah Indonesia. Hal ini mengingat keduanya

berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat pesisir sekaligus pemanasan global. Untuk itu, sejak 1998, pemerintah telah menginisiasi program strategis Coral Reef Rehabilitation and Management Program (COREMAP). COREMAP-CTI hadir sebagai respons keprihatinan dunia atas degradasi wilayah pesisir, utamanya terumbu karang. Program strategis tersebut bertujuan untuk melindungi, merehabilitasi, dan mengelola terumbu karang serta ekosistemnya agar tetap lestari. Selain itu, COREMAP-CTI juga didesain untuk menghasilkan model inovasi pembangunan, terutama dalam mengelola ekosistem pesisir dan laut secara berkelanjutan serta mendukung upaya penanganan dampak perubahan iklim di sektor kelautan dan perikanan. COREMAP merupakan kegiatan dengan pendanaan terbesar dalam sejarah Indonesia, khususnya berkaitan dengan ekosistem pesisir yang di dalamnya mencakup terumbu karang. Sehingga kegiatan ini merupakan pengelolaan penyelamatan ekosistem terbesar dalam sejarah Indonesia.

3 | Mewujudkan Ekonomi Biru melalui Inovasi Pendanaan,

Gellwyn Jusuf, Tempo (23 Desember 2021)



Ditulis oleh Dr. Ir. Gellwynn Jusuf, Perencana Ahli Utama Kementerian PPN/ Bappenas.

Selengkapnya dapat dilihat pada: <https://nasional.tempo.co/read/1542395/mewujudkan-ekonomi-biru-melalui-inovasi-pendanaan/full&view=ok>

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), tengah melakukan konsolidasi dengan berbagai kementerian/ lembaga terkait, dalam menyiapkan kerangka ekonomi biru

(*blue economy*). Ekonomi biru merupakan paradigma yang memanfaatkan sumberdaya kelautan secara berkelanjutan untuk pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat dan penyediaan lapangan kerja dengan menjaga kelestarian ekosistem perairannya. Hal ini sejalan dengan tujuan ke-14 dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (SDGs), yakni keberlanjutan ekosistem laut Indonesia.

Indonesia Climate Change Trust Fund

Lippo Kuningan 15th Floor
Jl. H.R. Rasuna Said Kav.B-12, Jakarta 12940, Indonesia.
Phone : (+62 21) 80679386 (Hunting)
Fax : (+62 21) 80679387
Email : secretariat@icctf.or.id



www.icctf.or.id

[ICCTFofficial](#)

[Indonesia Climate Change Trust Fund](#)

[@ICCTF_ID](#)



secretariat@icctf.or.id